

Indonesia Civil Society Forum 2023
Civic Space, Capacity and Sustainability
Jakarta, June 14 - 15, 2023



Indonesia Civil Society Forum 2023

Hari 1: Sambutan Utama dan Diskusi Panel

Demokrasi Inklusif dan Ruang Sipil di Era Pasca-Reformasi

14 Juni 2023, 08:00 - 12:00

Ikhtisar

Selama 25 tahun terakhir, sejak Reformasi pada tahun 1998, organisasi masyarakat sipil Indonesia telah berkontribusi dan mengambil manfaat dari berbagai capaian demokrasi yang penting. Namun, selama satu dekade terakhir, terjadi stagnasi dan kemunduran demokrasi, dengan menurunnya skor dalam beberapa indeks utama. Meskipun Indonesia mungkin tidak mengalami penurunan secepat negara-negara lain di seluruh dunia, negara ini tidak kebal terhadap kecenderungan otoriter. Hari pertama ICSF 2023 akan membahas bagaimana masyarakat sipil dan OMS dapat berkontribusi dalam mengurangi kemunduran demokrasi di Indonesia dan memastikan ruang sipil yang terbuka.

Para peserta di ICSF 2021 dan 2022 mencatat kebangkitan "*uncivil society*" dan tantangan terhadap kebebasan berserikat dan berekspresi dalam beberapa tahun terakhir. Para pembicara menyoroti meningkatnya polarisasi dan intoleransi agama dan etnis, yang berkontribusi pada kemunduran demokrasi. Seperti di banyak negara lain, nilai-nilai demokrasi terancam oleh kelompok-kelompok intoleran dan pelecehan secara online. Politik identitas juga meningkat selama sepuluh tahun terakhir, yang mengarah ke berbagai bentuk diskriminasi dan pengucilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, *cyber-bullying*, pelecehan secara online, dan diskriminasi telah menjadi hal yang umum terjadi di media sosial.

Hari pertama ICSF 2023 ini akan fokus pada **Demokrasi yang Inklusif dan Ruang Sipil di Era Pasca-Reformasi**, menyoroti apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil - dan telah dilakukan - untuk memastikan demokrasi yang inklusif dan melindungi hak-hak semua warga negara. Organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mempromosikan pembangunan perdamaian dan keberagaman sosial, serta memastikan bahwa suara mereka yang terpinggirkan terwakili dalam kebijakan publik.

Hari pertama akan dibuka dengan dua sambutan utama, pertama oleh Profesor **Yasonna H. Laoly**, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, dan sambutan kedua oleh Ibu **Bivitri Susanti**, Pendiri Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Setelah sambutan utama, peneliti dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Universitas Paramadina (PUSAD) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) akan mempresentasikan hasil dari dua survei nasional yang dilakukan baru-baru ini mengenai intoleransi sosial dan agama.

Selanjutnya, diskusi panel dan sesi diskusi kelompok, yang menampilkan para penggerak masyarakat sipil terkemuka dan para *reformist* di pemerintah akan mengembangkan tema dari sambutan utama. Mereka akan menyoroti praktik-praktik terbaik dan mendiskusikan berbagai aspek tantangan dan peluang bagi masyarakat sipil di Indonesia, yang antara lain mencakup perlindungan terhadap ruang sipil, inisiatif pembangunan perdamaian, persiapan masyarakat sipil untuk pemilu 2024, dan perlindungan bagi mereka yang terpinggirkan.

Pertanyaan Panduan

1. Di mana posisi masyarakat sipil di Indonesia saat ini, 25 tahun setelah Reformasi, dan bagaimana para aktivis masyarakat sipil menyikapi kemunduran demokrasi global akhir-akhir ini?
2. Apa saja strategi yang digunakan oleh OMS untuk melindungi ruang sipil dan demokrasi?
3. Bagaimana masyarakat sipil dapat merencanakan dan berkontribusi pada pemilu yang bebas dan adil pada tahun 2024?
4. Apa saja perkembangan hukum terkini dalam lingkungan yang mendukung masyarakat sipil dan kebebasan berekspresi dan berkumpul? Bagaimana tekanan terhadap kebebasan dan demokrasi akhir-akhir ini mempengaruhi OMS?
5. Apa saja perkembangan terkini bagi partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam urusan publik?
6. Apa saja praktik-praktik cerdas yang telah dilakukan oleh perempuan dan kaum muda dalam mempromosikan demokrasi yang inklusif?

Pembicara Utama

- Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia: *Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil untuk Memperkuat Demokrasi*
- Bivitri Susanti, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera: *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Indonesia Pasca Reformasi: Bagaimana Masyarakat Sipil Menggunakan Ruang Demokrasi*

Moderator untuk Diskusi Panel

- Dani Munggoro, INSPIRIT

Panelis

- Usman Hamid, Amnesty International
- Beatriz Sanz-Corella, Pakar Keterlibatan Sipil, Fasilitas Peta Jalan Masyarakat Sipil Uni Eropa
- Indah Putri Indriyani, Bupati, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan
- Ayu Kartika Dewi, Staf Khusus Presiden dan *Managing Director* INDIKA Foundation
- Damar Juniarto, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE.net)

Sesi ini akan dilanjutkan dengan *talkshow* dengan para panelis yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh moderator dan para peserta melalui aplikasi *Slido*.